



Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Di Sekretariat Daerah, Kabupaten Karimun

Halimah Tasya Umaira¹, Roli Sambuardi², Azmi³

Universitas Karimun, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: halimahtasya24@gmail.com, Rolis4mbuardi@gmail.com,
alazzamazmi@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Regional asset management faces various challenges related to limited information access, inadequate human resources, semi-manual management systems, the absence of a clearance system, and constrained budgets. This study aims to analyze the effectiveness of regional asset management in the Planning and Finance Division of the Regional Secretariat of Karimun Regency. Using a descriptive qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation, this research was conducted from March to April 2025. The analysis was carried out using Effendy's effectiveness theory, which encompasses eight indicators: capabilities and skills, motivation and job satisfaction, leadership and management, coordination and communication, resources and facilities, environmental and policy factors, organizational culture, and time and cost management. The findings indicate that regional asset management in the Planning and Finance Division has not yet been fully effective. Several obstacles remain unresolved, including a shortage of personnel, limited information technology infrastructure, communication gaps between asset users and managers, and difficulties in tracing certain fixed assets recorded in the Regional Property Management (BMD) system. Overall, continuous evaluation and improvement of technical, administrative, and technological aspects are essential to move toward more accountable, transparent, and sustainable regional asset management..

Keywords: Effectiveness, Regional Asset Management, Planning and Finance Division

ABSTRAK

Pengelolaan aset daerah menghadapi berbagai kendala yang mencakup keterbatasan akses informasi, kekurangan sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang masih semi manual, tidak adanya sistem clearance, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada periode Maret hingga April 2025. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas Effendy yang mencakup delapan indikator: kemampuan dan keterampilan, motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan dan pengelolaan, koordinasi dan komunikasi, sumber daya dan fasilitas, faktor lingkungan dan kebijakan, kultur organisasi, serta pengelolaan waktu dan biaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset

daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Sejumlah kendala masih belum terpecahkan, di antaranya kekurangan personel, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kesenjangan komunikasi antara pengguna dan pengelola aset, serta kesulitan penelusuran aset tetap tertentu yang tercatat dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Secara keseluruhan, evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan terhadap aspek teknis, administratif, dan teknologi merupakan langkah krusial menuju pengelolaan aset daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Aset Daerah, Bagian Perencanaan dan Keuangan.

PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan keseluruhan kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk fisik seperti tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan, maupun dalam bentuk non-fisik seperti hak cipta dan hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai penunjang operasional pemerintahan, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan aset yang efektif menjadi sangat penting agar nilai guna aset dapat dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

Kabupaten Karimun, sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan aset daerahnya. Tantangan tersebut meliputi rendahnya pemanfaatan aset secara optimal, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dalam administrasi dan pelaporan aset. Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun memegang tanggung jawab strategis dalam penatausahaan aset yang tersebar di 12 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Tanggung jawab tersebut mencakup pencatatan aset, proses hibah, pinjam pakai, penghapusan, lelang, mutasi, hingga penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD) secara menyeluruh.

Berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam pengelolaan aset daerah di Bagian Perencanaan dan Keuangan mencakup keterbatasan akses terhadap informasi aset, kurangnya jumlah personel pada bidang aset dan keuangan, proses pengelolaan yang masih bersifat semi manual, tidak tersedianya sistem clearance yang komprehensif, serta keterbatasan anggaran operasional. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aset dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah yang signifikan. Data sekunder menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan aset daerah dengan kebutuhan yang ada selama tiga tahun terakhir, yang berdampak langsung pada kualitas layanan administrasi aset.

Efektivitas organisasi pemerintahan menjadi kajian yang semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan akan tata kelola yang baik (good governance). Menurut Effendy dalam Wulandari dan Simon (2019), efektivitas didefinisikan

sebagai proses pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan, baik dari aspek waktu, biaya, maupun jumlah personel yang ditetapkan. Teori ini menguraikan delapan indikator utama yang memengaruhi efektivitas, yakni kemampuan dan keterampilan, motivasi dan kepuasan kerja, kepemimpinan dan pengelolaan, koordinasi dan komunikasi, sumber daya dan fasilitas, lingkungan dan kebijakan, kultur organisasi, serta pengelolaan waktu dan biaya. Pendekatan teori Effendy dipilih dalam penelitian ini karena dinilai komprehensif dan relevan untuk menganalisis kondisi organisasi pemerintahan yang kompleks seperti Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tema serupa dari berbagai sudut pandang. Aituarauw (2021) meneliti efektivitas pengelolaan aset daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan menemukan masih adanya gap antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Karyadinata (2021) menganalisis pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan fokus pada aspek teknis administrasi. Lebih lanjut, Cahyaningrum dan Sambharakreshna (2024) menelaah optimalisasi pengelolaan aset berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, sementara Sasmita dan Bustang (2024) menganalisis pengelolaan aset tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini berfokus pada evaluasi efektivitas secara menyeluruh menggunakan delapan indikator Teori Effendy di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, sekaligus mengidentifikasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan sistem tata kelola aset daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengalaman, persepsi, dan kondisi aktual di lingkungan organisasi pemerintahan yang memerlukan interpretasi kontekstual secara komprehensif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020). Penelitian ini tidak menghasilkan angka atau statistik, melainkan deskripsi mendalam yang bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan secara langsung.

Lokasi penelitian bertempat di Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bagian ini memiliki fungsi strategis sebagai pengelola aset daerah di 12 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan total aset tercatat sebanyak 2.677 item per Desember 2023, yang

meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas roda dua dan empat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya sebagai unit utama pengelola aset yang langsung berhadapan dengan berbagai tantangan administrasi dan teknis. Penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga April 2025.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga metode utama. Pertama, observasi langsung dilakukan untuk mengamati kondisi nyata pengelolaan aset dan aktivitas keseharian di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kedua, wawancara mendalam dilaksanakan secara semi terstruktur terhadap informan kunci, yang terdiri dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Substansi Bagian Aset dan Keuangan, serta beberapa staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa regulasi, laporan BMD, dan dokumen kebijakan yang relevan. Ketiga teknik tersebut saling mendukung dan melengkapi satu sama lain guna memastikan validitas dan kelengkapan data penelitian (Hardani, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, seluruh data mentah yang terkumpul dipilih dan difokuskan sesuai dengan relevansinya terhadap indikator efektivitas menurut Teori Effendy. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis dan penarikan makna. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik berdasarkan konsistensi temuan dari berbagai sumber data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda posisi dan perspektifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengalaman, persepsi, dan kondisi aktual di lingkungan organisasi pemerintahan yang memerlukan interpretasi kontekstual secara komprehensif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020). Penelitian ini tidak menghasilkan angka atau statistik, melainkan deskripsi mendalam yang bersumber dari data lapangan yang dikumpulkan secara langsung.

Lokasi penelitian bertempat di Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bagian ini memiliki fungsi strategis sebagai pengelola aset daerah di 12 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan total aset tercatat sebanyak 2.677 item per Desember 2023, yang meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas roda dua dan empat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya sebagai unit

utama pengelola aset yang langsung berhadapan dengan berbagai tantangan administrasi dan teknis. Penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga April 2025.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi tiga metode utama. Pertama, observasi langsung dilakukan untuk mengamati kondisi nyata pengelolaan aset dan aktivitas keseharian di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kedua, wawancara mendalam dilaksanakan secara semi terstruktur terhadap informan kunci, yang terdiri dari Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Substansi Bagian Aset dan Keuangan, serta beberapa staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa regulasi, laporan BMD, dan dokumen kebijakan yang relevan. Ketiga teknik tersebut saling mendukung dan melengkapi satu sama lain guna memastikan validitas dan kelengkapan data penelitian (Hardani, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, seluruh data mentah yang terkumpul dipilah dan difokuskan sesuai dengan relevansinya terhadap indikator efektivitas menurut Teori Effendy. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis dan penarikan makna. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik berdasarkan konsistensi temuan dari berbagai sumber data. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang berbeda posisi dan perspektifnya.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Berdasarkan Indikator Efektivitas Teori Effendy

No.	Indikator Efektivitas	Temuan Penelitian	Status
1	Kemampuan dan Keterampilan	Pegawai telah memenuhi SOP yang berlaku, namun kekurangan 2 personel pada bidang aset dan keuangan	Cukup Efektif
2	Motivasi dan Kepuasan Kerja	Minimnya sistem insentif dan penghargaan; pegawai mengharapkan peningkatan tunjangan	Belum Efektif
3	Kepemimpinan dan Pengelolaan	Kepemimpinan memberikan arah yang jelas; pengelolaan sesuai Permendagri No. 19/2016	Cukup Efektif
4	Koordinasi dan Komunikasi	Terdapat miskomunikasi antara pengguna dan	Belum Efektif

	pengelola aset; data aset sulit dilacak	
5	Sumber Daya dan Fasilitas	SDM memadai secara kuantitas, namun fasilitas IT terbatas dan anggaran operasional berkurang

Sumber: Olahan Data Penulis, 2025

a) Lingkungan dan Kebijakan

Aspek lingkungan dan kebijakan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan aset daerah. Berdasarkan keterangan Ibu Hefa Yolanda, salah satu kendala yang kerap dijumpai adalah sulitnya menelusuri keberadaan fisik kendaraan dinas roda dua dan empat yang usianya sudah cukup lama, meskipun secara administrasi kendaraan tersebut masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B) melalui aplikasi Simda BMD. Selain itu, aplikasi Simda BMD yang digunakan untuk mengelola Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, sehingga proses penginputan data menjadi terhambat. Terhadap aset yang sudah tidak terpakai, pengelola melakukan pelepasan melalui mekanisme lelang maupun hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Kultur Organisasi

Kultur organisasi di Bagian Perencanaan dan Keuangan mengacu pada sistem nilai dan norma yang mendorong pencapaian target kinerja tahunan. Menurut Bapak Syahriana Ramta, indikator keberhasilan yang digunakan adalah ketercapaian target perencanaan awal tahun pada akhir tahun anggaran. Namun, ditemukan bahwa adanya perpindahan tupoksi dari Bagian Humas ke Bagian Perencanaan dan Keuangan sejak tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 menyebabkan ketidaklengkapan informasi dan data aset yang dimiliki. Transisi ini mengakibatkan kurangnya keterbukaan informasi antar bagian yang berdampak pada kesulitan dalam pendataan aset secara komprehensif.

c) Pengelolaan Waktu dan Biaya

Dalam aspek pengelolaan waktu dan biaya, Kepala Bagian (Bapak Ahmad) menjelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dilakukan oleh dua bagian secara paralel, yaitu Bagian Perlengkapan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan pembagian tugas yang jelas. Bagian Perlengkapan bertanggung jawab atas rekap kebutuhan barang dan renovasi gedung, sedangkan Bagian Perencanaan dan Keuangan mengelola pencatatan, hibah, pinjam pakai, penghapusan, lelang, mutasi, dan pelaporan BMD. Sistem pembagian ini menunjukkan adanya struktur kerja yang terorganisasi, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan efisiensi pengelolaan waktu dan keterbatasan biaya operasional akibat kebijakan efisiensi anggaran.

DISKUSI

Berdasarkan temuan penelitian yang dianalisis menggunakan delapan indikator Teori Effendy, dapat dipahami bahwa efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun secara umum belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Effendy dalam Wulandari dan Simon (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan proses pencapaian tujuan yang harus terpenuhi secara serentak dari sisi waktu, biaya, dan personel. Ketika salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka organisasi belum dapat dikatakan efektif meskipun terdapat kemajuan di aspek lainnya.

Temuan terkait kekurangan personel pada bidang aset dan keuangan memperkuat argumen mengenai pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas organisasi. Hal ini senada dengan pendapat Akhmad (2019) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan pelatihan yang memadai, merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas suatu kegiatan. Kekurangan dua personel yang ditemukan dalam penelitian ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang tidak proporsional dan melemahkan kualitas layanan administrasi aset. Penelitian Aituarauw (2021) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar juga menemukan persoalan serupa, di mana keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab belum efektifnya pengelolaan aset.

Persoalan koordinasi dan komunikasi yang ditemukan dalam penelitian ini juga relevan dengan teori Effendy yang menempatkan koordinasi dan komunikasi efektif sebagai indikator kunci efektivitas organisasi. Miskomunikasi antara pengguna aset dan pengelola aset menyebabkan data aset sulit dilacak dan diperbarui, yang pada akhirnya menghambat proses pelaporan BMD yang akuntabel. Temuan ini senada dengan penelitian Wartuny (2020) yang menemukan bahwa lemahnya koordinasi antara unit kerja menjadi penyebab utama tidak efektifnya pengelolaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Sianturi dan Andika (2022) lebih lanjut menekankan pentingnya sistem manajemen aset yang terintegrasi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi penelusuran dan pengelolaan aset.

Keterbatasan fasilitas teknologi informasi yang ditemukan juga menjadi perhatian serius. Aplikasi Simda BMD yang digunakan belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan regulasi terbaru, sehingga menghambat akurasi dan kelengkapan data aset. Situasi ini bertentangan dengan indikator sumber daya dan fasilitas dalam Teori Effendy yang mensyaratkan ketersediaan fasilitas yang memadai sebagai prasyarat efektivitas. Cahyaningrum dan Sambharkreshna (2024) menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan aset berbasis sistem informasi web dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan aset secara signifikan. Hal ini memberikan arah yang jelas bahwa upgrading sistem informasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus diprioritaskan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Dari perspektif kultur organisasi dan kepemimpinan, penelitian ini menemukan bahwa komitmen pimpinan dan sistem nilai yang ditanamkan dalam organisasi cukup mendukung pengelolaan aset yang tertib. Hal ini mencerminkan prinsip kepemimpinan yang efektif sebagaimana dikemukakan Akhmad (2019), di mana kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Namun, proses transisi tupoksi yang tidak disertai dengan mekanisme transfer pengetahuan yang memadai membuktikan bahwa kultur organisasi yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan merupakan aspek yang perlu terus diperkuat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo dalam Admosoeprapto (2016) yang menekankan bahwa pencapaian tujuan organisasi harus didukung oleh kontrol dan pengawasan yang efektif, termasuk dalam masa transisi kelembagaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, perbaikan mekanisme koordinasi antar unit, serta pemutakhiran regulasi internal. Ketiadaan satu atau lebih unsur tersebut akan menghasilkan gap yang signifikan antara tujuan yang ditetapkan dengan capaian aktual di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nama dkk. (2020), pengelolaan aset daerah yang efektif pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah, sekaligus menjadi modal pengembangan kekuatan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun belum berjalan secara efektif apabila diukur menggunakan delapan indikator Teori Effendy. Meskipun terdapat sejumlah upaya positif seperti perencanaan yang terstruktur, penerbitan surat kuasa terbaru, pembaruan perjanjian penggunaan aset secara berkala, serta pelaksanaan mekanisme lelang dan hibah untuk aset yang sudah tidak terpakai, namun hambatan-hambatan fundamental masih belum teratasi secara menyeluruh. Kendala utama yang menyebabkan belum tercapainya efektivitas meliputi kekurangan personel pada bidang aset dan keuangan, minimnya fasilitas teknologi informasi yang terintegrasi, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pengguna dan pengelola aset, serta kesulitan dalam penelusuran aset tetap tertentu yang tercatat dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD).

Dari sisi upaya pengelolaan, Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menunjukkan komitmen yang memadai melalui berbagai tahapan pengelolaan, mulai dari pencatatan, penatausahaan, pengawasan, hingga pelepasan aset melalui mekanisme yang sesuai regulasi. Penggunaan aplikasi Simda BMD sebagai instrumen utama pengelolaan data aset juga mencerminkan upaya menuju digitalisasi pengelolaan aset daerah. Namun demikian, keterbatasan sistem dalam mengakomodasi ketentuan regulasi terbaru dan kurangnya integrasi informasi antar

unit kerja menjadi tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pimpinan organisasi dan pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan tata kelola aset yang lebih akuntabel dan transparan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Roli Sambuardi S.Sos., M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Azmi, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan ini. Apresiasi yang tulus juga disampaikan kepada Ibu Hj. Haryati, S.I.Kom., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta Ibu Frinda Novita, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Karimun atas dukungan akademis yang diberikan. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ahmad, S.E., M.AB. selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bapak Supriyono, S.E., M.Ak. selaku Kepala Bidang Aset dan Keuangan, serta seluruh staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 99-110.
- Akhmad. (2019). Efektivitas organisasi: Konsep dan pengukuran dalam sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 150-162.
- Cahyaningrum, Y., & Sambharakreshna, Y. (2024). Optimalisasi pengelolaan aset berbasis web dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan. *Journal of Information Technology and Computer Science (INTECOMS)*, 7(2), 473-484.
- Hardani, dkk. (2020). Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. *Pustaka Ilmu*.
- Karyadinata, M. (2021). Analisis pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Islam Riau*.
- Nama, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). Pengelolaan aset daerah. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta*.
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Sasmita, N. T., & Bustang. (2024). Analisis pengelolaan aset tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 1(2).
- Sianturi, M., & Andika, N. (2022). Peningkatan efisiensi penelusuran aset melalui sistem manajemen aset dan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Sistem Informasi, Teknik Informatika dan Teknologi Pendidikan*, 2(1), 11–21.
- Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. Rake Sarasin.
- Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33.
- Wulandari, & Simon. (2019). Implementasi teori efektivitas Effendy dalam organisasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 45–58.